

Judul : DPR Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius
Tanggal : Senin, 14 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KEKERASAN DI PAPUA

DPR Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil di Papua terus berulang. Komisi I DPR mendesak pemerintah serius menangani persoalan tersebut. Bahkan, Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan konflik di Papua mengingat eskalasinya yang meningkat.

Sebelumnya, tiga aparat sipil negara (ASN) tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Muliama, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026). Pada hari yang sama, insiden pelemparan yang diduga menggunakan bom molotov menyasar kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua di Jayapura.

Berdasarkan catatan Tim Papua, Komnas HAM, sepanjang 2025 tercatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang mengakibatkan 119 orang meninggal serta 43 orang luka-luka. Tren tersebut berlanjut pada semester I tahun 2026 dengan 42 peristiwa kekerasan yang merenggut 59 nyawa dan melukai 50 orang lainnya. Dari jumlah korban meninggal itu, 43 orang merupakan warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata.

Dampak dari konflik memicu gelombang ribuan pengungsi yang tersebar di Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukanta menilai, meningkatnya serangan terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Sasaran terhadap warga sipil, menurut dia, dapat menjadi indikasi bahwa kelompok bersenjata semakin mengendalikannya teror dan menciptakan ketakutan untuk mempertahankan pengaruhnya.

"Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil," ujar Sukanta, Minggu (13/9).

Ia meminta aparat mengusut



Pejemputan jenazah Willi Mbuik di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (11/9/2025). Willi merupakan salah satu aparat sipil negara yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Muliama, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).

tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," katanya.

Seiring dengan penegakan hukum, menurut dia, pembahasan dan pelayanan publik harus terus berjalan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk melindungi warga sipil dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror dan ketakutan.

Perkuat koordinasi

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono berpandangan bahwa penembakan terhadap tiga ASN oleh KKB di Papua merupakan tindakan kekerasan serius yang tidak dapat dibiarkan. Para korban tengah menjalankan tugas melayani masyarakat sehingga keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama.

"Kejadian ini juga menunjukkan bahwa ancaman terhadap masyarakat dan aparat negara di Papua masih perlu ditangani serius," katanya.

Ia mendukung langkah aparat untuk segera mengejar dan menangkap pelaku serta memastikan proses hukum berjalan. Namun, setiap tindakan di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pengamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan juga perlu diperkuat. Pengamanan itu terutama di titik-titik rawan dan jalur aktivitas masyarakat ataupun pegawai pemerintah.

"Hal yang paling penting, negara tidak boleh membiarkan masyarakat ataupun aparat sipil menjadi sasaran kekerasan. Pelaku harus diproses sesuai hukum, sementara keamanan masyarakat harus dipastikan agar aktivitas pemerintahan dan kehidupan warga di Papua dapat terus berjalan tanpa rasa takut," tutur Dave.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menilai aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terus berulang. Kejadian tersebut harus menjadi momentum memperkuat langkah pemerintah menangani KKB di Papua secara menyeluruh.

Penanganan tidak cukup di-

lakukan secara parsial atau kasus per kasus. "Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban," katanya.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengungkapkan bahwa situasi di Papua ditandai oleh rantai kekerasan tanpa ujung yang telah berlangsung hampir dua tahun terakhir. Konflik tersebut telah menelan korban jiwa dari berbagai kalangan, mulai dari warga sipil, orang asli Papua, hingga aparat negara. Persoalan kian pelik karena proses hukum terhadap pelaku ataupun pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian kekerasan tersebut tidak berjalan optimal.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Filep Wamafma mendesak Presiden agar segera memimpin penanganan dan evaluasi konflik Papua. Presiden perlu menetapkan peta jalan penyelesaian yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antar lembaga, dan mekanisme pengawasan yang jelas. (BOW/SYA/KAT)